

Akuntabilitas Publik dalam Implementasi Digitalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di DKI Jakarta

Syafina Ainur Yusup*, Alfi Mubarak, Rayhan Ibnu Hafiz, Fatkhuri, Maisarah Mitra Adrian

FISIP UPN "Veteran" Jakarta

Abstrak: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data nasional utama yang dijadikan acuan pemerintah dalam penetapan penerima program bantuan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi digitalisasi DTKS di Provinsi DKI Jakarta serta kontribusinya terhadap akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan bantuan sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode studi dokumentasi dan analisis data sekunder yang mencakup periode 2017-2023. Data diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan resmi pemerintah, serta publikasi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi DTKS telah memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi administrasi dan keterlacakan data secara kelembagaan. Namun demikian, akuntabilitas publik yang substantif belum terwujud secara optimal. Terdapat empat persoalan utama yang teridentifikasi: pertama, persistensi inclusion error pada kisaran 20-30% yang mengindikasikan masih masuknya penerima yang tidak berhak; kedua, exclusion error pada kisaran 30-40% yang menunjukkan kelompok rentan belum terjangkau sistem secara memadai; ketiga, proses validasi di tingkat RT dan RW yang rentan terhadap subjektivitas akibat absennya protokol terstandarisasi; dan keempat, keterbukaan data penerima kepada publik yang masih sangat terbatas sehingga menghambat pengawasan masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut penelitian ini merekomendasikan, penguatan integrasi data lintas lembaga untuk meminimalkan error data, standarisasi mekanisme validasi lapangan guna mengurangi subjektivitas, serta perluasan akses publik terhadap data penerima sebagai bentuk transparansi. Langkah-langkah ini dipandang krusial untuk mengoptimalkan DTKS sebagai instrumen tata kelola yang akuntabel dan berkeadilan.

Kata Kunci: Akuntabilitas Publik, Bantuan Sosial, DKI Jakarta, DTKS, E-Government

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i2.481>

Correspondence: Syafina Ainur Yusup

Email:

2410413009@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 13-04-2026

Accepted: 13-05-2026

Published: 13-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The Integrated Social Welfare Data (DTKS) is the primary national database used by the government to identify recipients of social assistance programs. This study aims to analyze the implementation of DTKS digitalization in DKI Jakarta Province and its contribution to local government accountability in managing social assistance. This research uses a qualitative, descriptive-analytical approach with documentation study methods and secondary data analysis covering the period 2017-2023. Data were obtained from policy documents, official government reports, and relevant scientific publications. The results show that DTKS digitalization has made a positive contribution to administrative efficiency and institutional data traceability. However, substantive public accountability has not been optimally realized. Four main issues were identified: first, the persistence of inclusion errors in the range of 20-30%, indicating that ineligible recipients are still included; second, exclusion errors in the range of 30-40%, indicating that vulnerable groups have not been adequately addressed by the system; third, the validation process at the RT and RW levels is prone to subjectivity due to the lack of standard protocols; fourth, the very limited disclosure of recipient data to the public, which hinders public oversight. Based on these findings, this study recommends strengthening cross-agency data integration to minimize data errors, standardizing field validation mechanisms to reduce subjectivity, and expanding public access to data recipients for transparency. These steps are considered crucial for optimizing the Disaster Mitigation Data (DTKS) as an instrument of accountable and equitable governance.

Keywords: Public Accountability, Social Assistance, DKI Jakarta DTKS, E-Government

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong transformasi mendasar dalam penyelenggaraan administrasi publik. Pemerintah, khususnya di negara-negara berkembang yang semakin memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan kualitas layanan, efisiensi administrasi, dan transparansi kebijakan dan transformasi yang secara luas dikenal sebagai *e-government*. ([Grafton, 2006](#)) berargumen bahwa keberhasilan implementasi *e-government* tidak semata-mata ditentukan oleh infrastruktur teknologi yang tersedia, melainkan kesiapan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia. ([Indrajit, 2016](#)) menegaskan bahwa transformasi digital pemerintahan harus disertai redesign proses bisnis dan reformasi budaya organisasi, bukan sekadar otomatisasi prosedur yang sudah ada.

([Taufiq Hidayat et al., 1945](#)) menemukan bahwa implementasi *e-government* masih menghadapi hambatan utama berupa keterbatasan infrastruktur, literasi digital aparatur, dan resistensi budaya organisasi. Meskipun penerapan aplikasi digital LPSE, SIDUMAS, JAKI, dan OSS telah terbukti meningkatkan efisiensi administrasi dan kepuasan publik. Tantangan ini tampak nyata dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial, yang mana digitalisasi bersinggungan langsung dengan persoalan akuntabilitas publik.

Akuntabilitas publik, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh ([Bovens, 2007](#)), mencakup tiga elemen yang saling terkait yaitu kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi kepada publik, kemampuan publik untuk menilai dan mempertanyakan keputusan pemerintah, serta adanya konsekuensi atas kegagalan pertanggungjawaban. Dalam kerangka *good governance* yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* ([UNDP. Human Development Report Office, 1997](#)), sistem yang akuntabel harus mewujudkan prinsip transparansi, partisipasi, efektivitas, dan responsivitas. ([Farazmand, 2012](#)). *Good governance* yang substantif mensyaratkan pelibatan aktif warga bukan hanya sebagai penerima layanan, melainkan sebagai aktor yang memiliki kapasitas untuk mempertanyakan dan mengevaluasi keputusan pemerintah. Secara keseluruhan, kerangka-kerangka ini menempatkan digitalisasi bukan sebagai tujuan teknis saja, melainkan sebagai mekanisme tata kelola yang menentukan apakah ruang pengawasan publik semakin terbuka atau justru semakin menyempit.

Di Indonesia, digitalisasi tata kelola kesejahteraan sosial diwujudkan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. DTKS berfungsi sebagai referensi nasional utama dalam mengidentifikasi dan menetapkan penerima program bantuan sosial, meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan berbagai skema bantuan sosial lainnya. ([Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2022](#)) menunjukkan bahwa DTKS mencakup lebih dari 40 juta keluarga

atau sekitar 96 juta jiwa di seluruh Indonesia yang masuk dalam kategori miskin dan rentan miskin. ([Nugroho, 2017](#)) mengingatkan bahwa efektivitas sistem DTKS tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, melainkan oleh konsistensi implementasi kebijakan yang menopangnya, mencakup kejelasan regulasi, komitmen anggaran, dan koordinasi lintas sektor.

Signifikansi DTKS semakin meningkat pasca pandemi COVID-19 yang secara dramatis memperluas cakupan dan urgensi penyaluran bantuan sosial. Namun, skala krisis yang besar juga mengungkap kelemahan sistemis yang sudah ada sebelumnya. ([The World Bank, 2022](#)) mencatat bahwa sistem *targeting* dalam bantuan sosial selalu menghadapi dilema antara ketepatan sasaran, cakupan perlindungan, dan keterbatasan kapasitas data. DTKS termanifestasi dalam dua bentuk kesalahan yaitu *inclusion error*, yakni penerima yang tidak layak tetap terdaftar, dan *exclusion error*, yakni penerima yang layak justru tidak tercakup sistem. Kajian ([Widyaningsih et al., 2023](#)) di enam daerah di Indonesia menemukan bahwa kedua jenis kesalahan ini terjadi secara simultan, dipicu oleh keterlambatan pembaruan data dan lemahnya integrasi antar instansi. ([Masiero & Das, 2019](#)) memperingatkan bahwa digitalisasi program anti kemiskinan justru berpotensi menciptakan bentuk-bentuk ketidakadilan data baru, di mana sistem yang tidak dirancang secara inklusif dapat secara sistematis mengeksklusi penerima yang sesungguhnya berhak.

Di DKI Jakarta, provinsi dengan kepadatan penduduk dan kompleksitas sosial tertinggi di Indonesia mengakibatkan implementasi DTKS yang efektif menjadi sangat krusial. ([BPS, 2023](#)) mencatat tingkat kemiskinan di DKI Jakarta pada tahun 2022 sebesar 4,61% dari total penduduk, dengan jumlah penduduk miskin mencapai sekitar 502 ribu jiwa. Kondisi sosial ekonomi kota yang dinamis, ditandai oleh mobilitas penduduk yang tinggi dan stratifikasi sosial yang beragam, menuntut sistem data yang akurat dan rutin diperbarui. Pada saat yang sama, proses validasi yang melibatkan RT dan RW berpotensi menimbulkan subjektivitas akibat relasi sosial di tingkat lokal, sebagaimana didokumentasikan oleh ([Haikal & Fitriati, 2023](#)) dalam studi penyaluran bantuan sosial tunai DKI Jakarta selama pandemi COVID-19. ([Dwiyanto, 2011](#)) menegaskan bahwa subjektivitas semacam ini merupakan manifestasi dari lemahnya pengawasan internal birokrasi, yang pada akhirnya menggerus kepercayaan publik terhadap integritas program kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai DTKS dan sistem data kesejahteraan sosial mencerminkan tiga arus kajian yang saling bersilangan. Arus pertama berfokus pada kualitas data secara teknis, di mana ([Widyaningsih et al., 2023](#)) dan ([Purwnto & Sulistyastuti, 2012](#)) mengidentifikasi *inclusion error* dan *exclusion error* sebagai masalah struktural yang bersumber dari keterlambatan pembaruan data dan fragmentasi koordinasi

antarinstansi. Arus kedua mengkaji kesenjangan implementasi, (Grafton, 2006) menunjukkan bahwa hasil digitalisasi lebih ditentukan oleh kapasitas kelembagaan daripada besarnya investasi teknologi. Arus ketiga menyentuh dimensi normatif tata kelola, di mana ([Bovens, 2007](#); [Farazmand, 2012](#); [UNDP. Human Development Report Office, 1997](#)) menegaskan bahwa digitalisasi hanya memenuhi potensi tata kelolanya apabila disertai keterbukaan data dan mekanisme partisipasi publik. Penelitian ini mensintesis ketiga arus tersebut dengan menganalisis digitalisasi DTKS di DKI Jakarta melalui kerangka akuntabilitas yang terpadu dalam sebuah pendekatan yang belum hadir dari literatur sebelumnya yang cenderung berfokus secara terpisah pada dimensi teknis atau administratif semata.

Penelitian ini menempatkan digitalisasi DTKS dalam kerangka akuntabilitas publik, sehingga digitalisasi dipahami bukan hanya sebagai instrumen efisiensi administratif, melainkan sebagai mekanisme yang secara langsung membentuk kualitas relasi pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan berpijak pada konsepsi akuntabilitas ([Bovens, 2007](#)) dan prinsip-prinsip *good governance* ([UNDP. Human Development Report Office, 1997](#)), penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian: Pertama, bagaimana implementasi digitalisasi DTKS di DKI Jakarta, khususnya terkait akurasi data, proses validasi, dan koordinasi antar aktor? Kedua, sejauh mana digitalisasi DTKS berkontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah di DKI Jakarta, dan faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitasnya?

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen untuk menganalisis implementasi digitalisasi DTKS dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah di DKI Jakarta. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap proses implementasi kebijakan, tata kelola pemerintahan digital, dan berbagai fenomena sosial yang muncul dalam pelaksanaan DTKS sebagai sistem pendataan bantuan sosial. Pendekatan ini dinilai paling tepat untuk menangkap kompleksitas relasi antar aktor, dinamika kelembagaan, dan dimensi akuntabilitas yang tidak dapat direduksi menjadi data numerik semata ([Prof. DR. Lexy J. Moleong, n.d.](#); [Sugiyono, 2015](#)).

DKI Jakarta dipilih secara *purposive* sebagai lokasi penelitian dengan tiga pertimbangan utama. Pertama, Jakarta merupakan provinsi dengan kepadatan penduduk dan kompleksitas sosial tertinggi di Indonesia, sehingga menjadi konteks yang paling menantang sekaligus representatif bagi implementasi sistem data kesejahteraan sosial berskala besar. Kedua, cakupan DTKS di DKI Jakarta yang mencakup ratusan ribu keluarga

menjadikannya kasus yang strategis untuk menguji efektivitas digitalisasi dalam kondisi tata kelola perkotaan yang kompleks. Ketiga, tersedianya dokumen kebijakan daerah, laporan resmi, dan studi akademik yang relatif lebih lengkap dibandingkan provinsi lain memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan terdokumentasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan memanfaatkan data sekunder yang memenuhi tiga kriteria meliputi relevansi substansial dengan tema digitalisasi DTKS dan akuntabilitas publik, kredibilitas sumber yang diterbitkan oleh lembaga resmi pemerintah, lembaga riset bereputasi, jurnal akademik terindeks, dan keterbaruan data yang mencakup rentang waktu 2017-2023. Periode ini dipilih karena menandai fase krusial perkembangan DTKS, mulai dari penguatan regulasi melalui Permensos Nomor 5 Tahun 2019, implementasi masif pada masa pandemi COVID-19 (2020-2021), hingga upaya pemutakhiran data pascapandemi. Sumber data mencakup regulasi pemerintah, laporan resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia, data statistik Badan Pusat Statistik, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen pemerintah daerah DKI Jakarta yang berkaitan dengan implementasi DTKS. Penelitian ini juga memanfaatkan publikasi dari SMERU *Research Institute* dan *World Bank* sebagai sumber komparatif untuk memperkuat analisis mengenai tata kelola bantuan sosial dan digitalisasi pelayanan publik.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis konten dan analisis tematik kualitatif. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan, dibandingkan, dan dianalisis berdasarkan tema utama penelitian, yaitu akurasi data, proses validasi, koordinasi antar aktor, dan kontribusi digitalisasi terhadap akuntabilitas publik, guna menemukan pola dan permasalahan sistemis dalam implementasi DTKS. Untuk meningkatkan validitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan dokumen resmi, publikasi akademik, dan laporan penelitian independen, sehingga hasil analisis yang diperoleh lebih objektif, konsisten, dan terhindar dari bias sumber tunggal.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi DTKS di DKI Jakarta berlangsung dalam struktur tata kelola berlapis yang melibatkan Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, unit layanan sosial tingkat kota/kabupaten, hingga aktor komunitas RT dan RW. Sistem ini memungkinkan pejabat pemerintah untuk melacak data penerima, memproses permintaan inklusi atau eksklusif, dan menghasilkan laporan distribusi bantuan sosial. ([Irwan Noor, 2013](#)) mencatat bahwa inovasi tata kelola pemerintah daerah seperti ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan responsivitas layanan publik, namun keberhasilannya sangat bergantung pada seberapa kuat komitmen kelembagaan yang menyertainya, bukan semata-mata pada kebaruan teknologi yang digunakan.

Berdasarkan data ([Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2022](#)), DTKS secara nasional mencakup 40.030.590 keluarga penerima manfaat yang terdiri dari empat desil terbawah populasi Indonesia. Di DKI Jakarta, jumlah penerima manfaat yang terdaftar dalam DTKS mencapai sekitar 1,2 juta keluarga. Data ([BPS, 2023](#)) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin DKI Jakarta pada Maret 2023 berada di angka 4,44% atau sekitar 480,77 ribu jiwa.

Tabel 1. Data Kemiskinan dan Cakupan DTKS DKI Jakarta (2021-2023)

Tahun	Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Kemiskinan (%)	Penerima DTKS (ribu KK)
2021	502,20	4,67	1.250 (estimasi)
2022	494,93	4,61	1.230 (estimasi)
2023	480,77	4,44	1.200 (estimasi)

Sumber: (BPS, 2023; Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2022), *diolah penulis.*

Tabel 1 memperlihatkan bahwa jumlah keluarga penerima DTKS di DKI Jakarta secara konsisten melampaui angka kemiskinan resmi BPS. Kesenjangan ini mencerminkan bahwa DTKS tidak hanya mencakup penduduk yang dikategorikan miskin, tetapi juga kelompok rentan (*near poor*) yang berpotensi jatuh ke dalam kemiskinan. Disparitas tersebut juga dapat mengindikasikan adanya *inclusion error* yang terjadi secara sistemis, di mana keluarga yang tidak lagi memenuhi kriteria kemiskinan tetap terdaftar dalam basis data akibat pembaruan data yang tidak konsisten. Persistensi kesalahan semacam ini lazimnya mencerminkan absennya mekanisme evaluasi implementasi yang bersifat berkelanjutan dan berbasis data, bukan sekadar evaluasi periodik yang bersifat administratif ([Purwanto & Sulistyastuti, 2012](#)).

Salah satu tantangan paling persisten dalam implementasi DTKS adalah terjadinya *inclusion error* dan *exclusion error* secara bersamaan. Kajian ([Widyaningsih et al., 2023](#)) menemukan bahwa rata-rata tingkat *exclusion error* dalam program PKH berada di kisaran 30-40%, sementara *inclusion error* mencapai 20-30% dari total penerima manfaat. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara nasional, hampir sepertiga dari mereka yang seharusnya menerima bantuan tidak terjangkau oleh sistem. Temuan tersebut juga diperkuat oleh ([Morado, 2021](#)) yang menunjukkan bahwa penyaluran bansos di DKI Jakarta masih menghadapi permasalahan data penerima manfaat yang belum diperbarui, ketidaksesuaian data antara pemerintah pusat dan RT/RW setempat, dan masih ditemukannya penerima yang tidak semestinya masuk, termasuk PNS serta penerima bansos lain seperti PKH/BPNT. ([Morado, 2021](#)) menegaskan bahwa kesimpangsiuran data

dan validasi yang kurang efektif menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran sehingga menurunkan kepercayaan penerima terhadap program bansos pemerintah.

Tabel 2. Estimasi Tingkat Kesalahan Penetapan Sasaran Program Bantuan Sosial Berbasis DTKS

Jenis Kesalahan	Estimasi Nasional (%)	Faktor Penyebab Utama
<i>Inclusion Error</i>	20-30	Data tidak diperbarui, relasi sosial lokal
<i>Exclusion Error</i>	30-40	Mobilitas penduduk, Tidak terdata RT/ RW

Sumber: (Mulazid, 2025; The World Bank, 2022; Widyaningsih et al., 2023) *diolah penulis.*

Di DKI Jakarta, kompleksitas urban memperbesar risiko kedua jenis kesalahan ini. Tingginya mobilitas penduduk, baik migrasi masuk maupun keluar, menyebabkan kondisi sosial ekonomi keluarga berubah dengan cepat, sementara pembaruan data DTKS tidak selalu mengikuti kecepatan perubahan tersebut. ([The World Bank, 2022](#)) menegaskan bahwa keterlambatan pembaruan data menjadi faktor penentu utama dalam persistensi *targeting errors* pada program bantuan sosial, terutama di wilayah perkotaan dengan dinamika sosial yang tinggi. Kesalahan-kesalahan semacam ini bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan manifestasi dari ketidakadilan data yang terstruktur dalam arsitektur sistem digital perlindungan sosial itu sendiri, sehingga penanganannya memerlukan redesign menyeluruh terhadap logika inklusi yang digunakan dalam pengelolaan basis data ([Masiero & Das, 2019](#)). Kebijakan berbasis data yang tidak didukung oleh sistem pembaruan data yang responsif pada akhirnya akan kehilangan relevansinya sebagai instrumen pengambilan keputusan yang akurat dan berkeadilan ([Deddy, 2018](#)).

Proses validasi dalam DTKS melibatkan aparaturnya komunitas, khususnya RT dan RW, yang bertanggung jawab memverifikasi dan mengesahkan data calon penerima bantuan sosial. Desain ini secara sengaja memanfaatkan pengetahuan lokal, di mana mereka yang paling dekat dengan komunitas diasumsikan paling mampu menilai siapa yang benar-benar membutuhkan bantuan. Prinsip keterlibatan komunitas ini sejalan dengan penekanan pada partisipasi warga dalam kerangka *good governance* ([UNDP. Human Development Report Office, 1997](#)). Namun, ([Haikal & Fitriati, 2023](#)) mendokumentasikan bahwa hubungan sosial, afiliasi personal, dan dinamika politik lokal berpotensi mempengaruhi hasil validasi. Partisipasi komunitas yang tidak disertai mekanisme pengawasan yang memadai justru berisiko mengalihkan akuntabilitas dari ranah publik ke ranah relasi personal yang tidak terukur ([Farazmand, 2012](#)). Permasalahan ini diperburuk oleh ketiadaan protokol validasi yang terstandarisasi secara nasional maupun daerah.

([Dwiyanto, 2011](#)) mencatat bahwa standarisasi prosedur merupakan salah satu instrumen paling efektif dalam mengurangi diskresi yang tidak terstruktur di tingkat pelaksana, sekaligus memperkuat dasar akuntabilitas birokrasi terhadap publik.

Transparansi data DTKS di DKI Jakarta masih tergolong terbatas. Walaupun pemerintah pusat telah melakukan upaya peningkatan keterbukaan data melalui portal [data.go.id](#) dan sistem informasi Kementerian Sosial RI, warga masih mengalami berbagai kendala untuk memperoleh informasi terkait pihak yang terdaftar, mekanisme verifikasi data, dan prosedur penyampaian pengaduan maupun perbaikan data. ([Zuiderwijk & Janssen, 2014](#)) menegaskan bahwa ketersediaan portal data pemerintah saja tidak cukup untuk mewujudkan transparansi yang fungsional; yang lebih menentukan adalah kemudahan akses, keterbacaan data oleh publik umum, dan adanya mekanisme respons yang memungkinkan warga menindaklanjuti temuan mereka. ([Lathrop & Ruma, 2010](#)) menambahkan bahwa keterbukaan data yang sejati mensyaratkan pergeseran budaya kelembagaan dari paradigma data sebagai aset eksklusif pemerintah menuju paradigma data sebagai milik publik yang dikelola oleh pemerintah. Kondisi ini berimplikasi langsung terhadap fungsi pengawasan publik, karena tanpa informasi yang jelas dan mudah diakses, warga tidak dapat mengevaluasi apakah pemerintah telah bertindak adil dalam mendistribusikan bantuan sosial.

Tabel 3. Matriks Dimensi Akuntabilitas DTKS di DKI Jakarta

Dimensi Akuntabilitas	Indikator	Kondisi Aktual	Penilaian
Informasi	Ketersediaan data penerima	Terbatas, tidak mudah diakses publik	Lemah
Pertanggungjawaban	Penjelasan dasar penetapan penerima	Tidak tersedia secara terbuka	Lemah
Konsekuensi	Mekanisme koreksi data	Ada, namun belum efektif	Sedang
Efisiensi Admin	Kecepatan proses dan keterlacakan data	Meningkat pasca digitalisasi	Baik

Sumber: (Bovens, 2007; Haikal & Fitriati, 2023; Widyaningsih et al., 2023)

Tabel 3 memperlihatkan bahwa digitalisasi DTKS telah memberikan kontribusi nyata pada dimensi efisiensi administrasi, namun tiga dimensi akuntabilitas lainnya menurut kerangka ([Bovens, 2007](#)) masih berada pada level yang lemah hingga sedang. Peningkatan efisiensi teknis hampir selalu mendahului perbaikan transparansi dan akuntabilitas publik, karena keduanya menuntut perubahan yang lebih mendasar pada budaya dan struktur kelembagaan. Keterbukaan informasi dan kejelasan mekanisme

pertanggungjawaban kepada publik menjadi dua area yang paling membutuhkan perbaikan mendesak.

Temuan ([Haikal & Fitriati, 2023](#)) menunjukkan bahwa implementasi BST Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang didukung oleh pemutakhiran data melalui musyawarah kelurahan, pemadanan dengan data kependudukan, serta penghapusan penerima yang gagal salur, tetapi prosesnya masih menghadapi kendala teknis dalam pendistribusian buku tabungan dan kartu ATM juga keterbatasan penambahan penerima pengganti secara cepat. Temuan ini menguatkan bahwa digitalisasi meningkatkan keterlacakan administratif, tetapi belum otomatis menyelesaikan persoalan transparansi dan responsivitas publik.

Merangkum seluruh temuan, digitalisasi DTKS telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah DKI Jakarta dalam penyaluran bantuan sosial, namun hasilnya belum sepenuhnya optimal. Digitalisasi membangun infrastruktur kelembagaan yang mendukung akuntabilitas melalui penyediaan basis data terpusat dan adanya jejak audit (*audit trail*) dalam proses pengelolaan data. Akan tetapi, potensi tersebut masih terhambat oleh permasalahan kualitas data, lemahnya integritas dalam proses validasi, dan keterbatasan transparansi kepada publik. ([Haikal & Fitriati, 2023](#)) memperlihatkan pola yang sejalan, yakni bahwa bantuan sosial tunai di DKI Jakarta dapat berjalan relatif baik karena ditopang oleh seperangkat aturan yang lengkap dan dukungan banyak pihak, tetapi tetap menyisakan problem pada pemutakhiran data, keterlibatan masyarakat yang masih terbatas pada RT/RW, dan persoalan distribusi yang belum sepenuhnya mudah bagi penerima manfaat. ([Manoppo & Laoh, 2022](#))

Berdasarkan kerangka akuntabilitas ([Bovens, 2007](#)), digitalisasi DTKS telah meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menyediakan informasi pada tingkat kelembagaan melalui pencatatan yang lebih sistematis dan keterlacakan administratif yang lebih baik. Meski demikian, aspek pengawasan publik dan mekanisme koreksi yang menuntut keterbukaan akses data masih belum berjalan secara optimal. (Irwan Noor, 2013) mengingatkan bahwa inovasi pemerintahan yang berhenti pada peningkatan efisiensi internal tanpa menyentuh dimensi keterbukaan dan responsivitas terhadap warga pada hakikatnya baru menyelesaikan setengah dari persoalan tata kelola yang sesungguhnya. Akuntabilitas tidak hanya bergantung pada ketersediaan informasi, tetapi juga pada adanya saluran yang memungkinkan masyarakat menggunakan informasi tersebut untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah.

Simpulan

Penelitian ini menganalisis implementasi digitalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di DKI Jakarta dan kontribusinya terhadap peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan sosial. Dengan menempatkan digitalisasi dalam kerangka akuntabilitas publik (Bovens, 2007) dan prinsip-prinsip *good governance* (UNDP. Human Development Report Office, 1997), temuan penelitian menggambarkan bahwa digitalisasi telah memberikan kemajuan signifikan pada dimensi efisiensi administratif, namun belum mampu mentransformasi relasi pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat secara menyeluruh.

Berkenaan dengan pertanyaan penelitian pertama, implementasi digitalisasi DTKS di DKI Jakarta berlangsung dalam struktur tata kelola berlapis yang secara teknis telah meningkatkan kecepatan pemrosesan data, keterlacakan administratif, dan kapasitas pelaporan distribusi bantuan sosial. Namun terdapat tiga persoalan struktural yang menghambat efektivitasnya. Pertama, akurasi data terganggu oleh pembaruan yang tidak konsisten dan lemahnya integrasi data antar instansi, sehingga menghasilkan *inclusion error* pada kisaran 20-30% dan *exclusion error* pada kisaran 30-40% secara nasional, dengan risiko lebih tinggi di Jakarta akibat mobilitas penduduk yang sangat dinamis. Kedua, mekanisme validasi yang melibatkan RT dan RW rentan terhadap subjektivitas akibat tidak adanya protokol terstandarisasi dan pengawasan independen yang memadai. Ketiga, koordinasi antar aktor dalam ekosistem pengelolaan DTKS masih bersifat sektoral dan belum terwujud sebagai sistem integrasi data yang kohesif.

Pertanyaan penelitian kedua, kontribusi digitalisasi DTKS terhadap akuntabilitas pemerintah daerah DKI Jakarta bersifat asimetris. Digitalisasi terbukti efektif dalam memperkuat akuntabilitas internal kelembagaan melalui pencatatan yang lebih sistematis dan jejak audit yang lebih terstruktur. Akan tetapi, tiga dimensi akuntabilitas publik yang lebih substantif, yaitu keterbukaan informasi kepada warga, kejelasan mekanisme pertanggungjawaban atas keputusan penetapan penerima bantuan, serta efektivitas saluran koreksi dan pengaduan masih berada pada level yang lemah hingga sedang. Kondisi ini mengkonfirmasi argumen bahwa digitalisasi tanpa komitmen terhadap keterbukaan data hanya menghasilkan efisiensi administratif tanpa memperluas ruang pengawasan publik. Budaya transparansi melalui TIK hanya terwujud ketika pemerintah secara aktif merancang sistem digitalnya untuk membuka akses publik, bukan sekadar mengotomasi proses internal birokrasi.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dengan menunjukkan bahwa dalam negara berkembang, digitalisasi sistem kesejahteraan sosial cenderung menghasilkan kondisi yang dapat disebut sebagai akuntabilitas prosedural tanpa akuntabilitas substantif.

Pemerintah semakin mampu mendokumentasikan dan melacak prosesnya secara internal, namun publik belum memperoleh kapasitas yang setara untuk menilai dan mempertanyakan keputusan yang dihasilkan. Kesenjangan ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma dari digitalisasi sebagai instrumen efisiensi administratif menuju digitalisasi sebagai infrastruktur akuntabilitas demokratis yang berpusat pada hak warga negara atas informasi dan pengawasan.

Penelitian ini mengajukan empat rekomendasi kebijakan. Pertama, pemerintah perlu mengembangkan mekanisme pembaruan data DTKS yang bersifat dinamis dan berkelanjutan, didukung integrasi sistem data antarinstansi secara mutakhir. Kedua, diperlukan penetapan protokol validasi yang terstandarisasi secara nasional, dilengkapi verifikasi independen dan mekanisme banding yang mudah diakses warga, guna mereduksi subjektivitas dalam proses seleksi penerima bantuan sosial. Ketiga, pemerintah daerah DKI Jakarta perlu membuka akses publik terhadap data penerima bantuan sosial melalui portal informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, disertai mekanisme pengaduan dan koreksi data yang responsif. Keempat, investasi dalam penguatan literasi digital dan kapasitas teknis aparatur di seluruh tingkatan pemerintahan perlu dijadikan prioritas, mengingat kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan digitalisasi yang paling sering diabaikan dalam perencanaan kebijakan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui. Penggunaan data sekunder dan pendekatan studi dokumentasi membatasi kemampuan penelitian dalam menangkap perspektif langsung dari aktor pelaksana maupun penerima manfaat di lapangan. Penelitian lanjutan dengan metode campuran yang mencakup wawancara mendalam bersama aparatur Dinas Sosial, petugas validasi tingkat RT dan RW, serta warga penerima dan bukan penerima bantuan akan memperkaya pemahaman tentang dinamika implementasi DTKS secara lebih komprehensif. Studi komparatif antara DKI Jakarta dan provinsi lain dengan karakteristik demografis berbeda juga dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai faktor-faktor kontekstual yang menentukan keberhasilan digitalisasi sistem kesejahteraan sosial di Indonesia.

Referensi

Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. In *Government Information Quarterly* (Vol. 27, Nomor 3). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001>

- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework1. In European Law Journal (Vol. 13, Nomor 4). <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- BPS. (2023). Statistik Kesejahteraan Rakyat. Badan Pusat statistik. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Deddy, M. (2018). Studi kebijakan publik dan pelayanan publik konsep dan aplikasi proses kebijakan dan pelayanan publik. Jakarta: Alfabeta, 284. <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/205150/studi-kebijakan-publik-dan-pelayanan-publik-konsep-dan-aplikasi-proses-kebijakan-dan-pelayanan-publik>
- Dwiyanto. (2011). Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui REFORMASI BIROKRASI - Agus Dwiyanto - Google Books. PT. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=dyRqHYpVRRcC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Farazmand, A. (2012). The Future of Public Administration: Challenges and Opportunities- A Critical Perspective. Administration and Society, 44(4), 487–517. <https://doi.org/10.1177/0095399712452658>
- Grafton, C. (2006). Implementing and Managing eGovernment: An International Text. Social Science Computer Review. <https://doi.org/10.1177/0894439306287246>
- Haikal, M., & Fitriati, R. (2023). The policy implementation of DKI Jakarta Provincial Government social cash assistance during COVID-19 pandemic. Monas: Jurnal Inovasi Aparatur, 5(1), 16–29. <https://doi.org/10.54849/monas.v5i1.139>
- Indrajit, R. E. (2016). Konsep dan Strategi Electronic Government. Electronic Government, 84, 1–166. https://www.academia.edu/30100450/Electronic_Government
- Irwan Noor. (2013). Desain Inovasi Pemerintahan Daerah - Irwan Noor - Google Buku. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=FxRkDwAAOBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=pemerintah+daerah&ots=8JWQVxwkIjR&sig=pc5RdWpEXCE07IToWhPiJY9A14&redir_esc=y#v=onepage&q=pemerintah daerah&f=false

- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). Data terpadu kesejahteraan sosial. <https://jdih.kemensos.go.id/detail/Keputusan-Menteri-Sosial-Republik-Indonesia-Nomor-29-HUK-202-0f9a7008-a>
- Lathrop, D., & Ruma, L. (2010). Open government: Collaboration, transparency, and participation in practice. <https://books.google.co.id/books?id=JQJ5LF3h4ikC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Manoppo, E. V., & Laoh, N. A. (2022). Strategi Pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Dtks) Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Rs-Rtlh Oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Konstituen*, 4(1), 25–39. <https://doi.org/10.33701/jk.v4i1.2598>
- Masiero, S., & Das, S. (2019). Datafying anti-poverty programmes: implications for data justice. *Information Communication and Society*, 22(7), 916–933. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1575448>
- Morado, R. (2021). Implementasi Penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 Di Dki Jakarta. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 122–137. <https://doi.org/10.14710/dialogue.v3i2.11879>
- Mulazid, A. S. (2025). ANALYSIS OF ALTERNATIVE SOCIAL PROTECTION POLICIES IN INDONESIA: A SYSTEMATIC REVIEW OF RESILIENCE, DIGITALIZATION, AND GOVERNANCE. 14(2). <https://doi.org/10.15408/empati>
- Nugroho, R. (2017). Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik. In Jakarta: Elex Media Komputindo (Vol. 1, hal. 940). http://perpustakaan.kemendagri.go.id/opac/?p=show_detail&id=8139
- Prof. DR. Lexy J. Moleong, M. A. (n.d.). Metodologi penelitian kualitatif. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>
- Purwnto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). Implementasi Kebijakan Konsep dan Aplikasinya di Indonsia. <https://books.google.co.id/books?id=TPaYMwEACAAJ>
- Sugiyono, P. D. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1543971>

- Taufiq Hidayat, M., Sri Guntur, Y., & Penulis, K. (1945). Tranformasi Digital Melalui Implementasi E-Government Pada Organisasi Sektor Publik Fakuldade da Ekonomia Universidade da Paz Timor-Leste 2. Universitas, 31(2), 123–141.
- The World Bank. (2022). Revisiting Targeting in Social Assistance: A New Look at Old Dilemmas. Revisiting Targeting in Social Assistance: A New Look at Old Dilemmas. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1814-1>
- UNDP. Human Development Report Office. (1997). Human development report 1997. <https://digitallibrary.un.org/record/239803?v=pdf>
- Widyaningsih, D., Nina Toyamah, & Ruhmaniyati. (2023). Urgensi Memutakhirkan Data Terpadu the Urgency of Sustainable and High-Quality Update of Integrated Poverty Data: Lessons Learned From Case Studies in Six Indonesian Regions. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 31(2), 2–8. <https://doi.org/10.55981/jep>.
- Zuiderwijk, A., & Janssen, M. (2014). Open data policies, their implementation and impact: A framework for comparison. Government Information Quarterly, 31(1), 17–29. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.04.003>